

JATIDIRI, PROFESIONALISME DAN MODERNISASI POLRI

Oleh: H. Soebroto Brotodiredjo

Pendahuluan

Tulisan ini didasarkan pada hasil seminar Polri 1995 yang membahas masalah Jatidiri Polri, Profesionalisme Polri dan Modernisasi Polri, berupa tambahan yang dirasa perlu untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah-masalah tersebut.

Dapat dikatakan bahwa jatidiri merupakan diri sesuatu. Namun berbeda dengan karakter manusia yang sukar dapat dirubab karena merupakan pembawaan sejak lahir, jatidiri benda terutama yang non-material dapat saja dirubab dengan mengganti bentuk penampilannya atau menghilangkan sifat-sifat yang negatif dan kondisi yang merugikan.

Profesionalisme adalah pabam yang menyatakan bahwa suatu profesi harus dilaksanakan secara sempurna dengan basil yang maksimal. Ada bubungan antara profesionalisme dengan jatidiri, karena profesionalisme menyangkut fungsi dari organisasi yang pada hakekatnya merupakan jatidiri.

Adapun modernisasi merupakan penyempurna bagi profesionalisme, dan dapat juga dicari kaitannya dengan jatidiri.

Jatidiri

Jatidiri merupakan keadaan atau kondisi yang spesifik dari sesuatu yang berbentuk material maupun non-material. Sifat spesifik ini mengasumsikan suatu perbandingan dengan benda (material maupun non-material) yang mempunyai sifat-sifat atau kondisi lain.

Tanpa perbandingan ini kita tidak dapat bicara tentang jatidiri. Dengan perbandingan ini kita sampai pada istilah-istilah yang sinonim dengan jatidiri seperti: identitas, personalitas, individualitas, karakteristik, unit, kekhasan, atau ciri-ciri khas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, istilah "jati" diartikan sebagai:

1. Ciri-ciri, gambaran atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda, identitas.
2. Inti, jiwa, semangat dan daya gerak dari dalam, spiritualitas.

Istilah "identitas" yang biasa dipakai sebagai sinonim bagi "jatidiri", menurut "New College Standard Dictionary" dari Funk dan Wagnalls adalah Identity:

1. The state of being identical or absolutely the same; selfsameness; also, sameness of character or quality. Identity maybe of two sorts; absolute, which involves exact quality with itself or selfsameness, as the equation $a=a$; and relative, a less rigid sense, which implies a close material resemblances or similarity, as that of the green of two leaves.
2. The distinctive character belonging to an individual; personality; individuality.
3. The state of being what is asserted.

Perbandingan untuk menentukan jatidiri dapat dilakukan dengan unsur atau komponen lain yang mempunyai beberapa kesamaan dalam kelompok atau golongan besar (negara; masyarakat) seperti: sebagai aparatur pemerintahan; sebagai pelindung masyarakat, dan lain-lain), atau dalam kelompok terbatas

seperti: ABRI; kelompok penegak hukum dan lain-lain. Juga dapat dilakukan dengan obyek sejenis seperti: Polri dibandingkan dengan Polisi Jepang dan lain-lain.

Dibandingkan dengan fungsi dan aparat lain dalam pemerintahan, maka jatidiri Polri sudah ditemukan pada jaman renaissance, yang membagi fungsi pemerintahan dalam:

1. Pertahanan negara (defensi).
2. Hubungan luar negeri (diplomasi).
3. Kehakiman (justisi).
4. Keuangan (finans) dan Polisi (=urusan dalam negeri).

Pada tahun 1898, jatidiri polisi ditonjolkan oleh C. von Vollenhoven dalam disertasinya yang berjudul "Omtrek en inhoud van het internationale recht" yang membantah kebenaran teori trias-politica dari Montesquieu, karena ada fungsi maupun badan yang lain daripada eksekutif, ialah polisi yang tugasnya adalah menegakkan hukum, ialah bertindak terhadap pihak ketiga yang menyimpang dari hukum.

Jatidiri pada hakikatnya ditentukan oleh unsur yang paling pokok, ialah unsur-unsur penentu eksistensi seperti: atom, molekul, kromosom dsb bagi benda material, dan kategori-kategori, asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok bagi "benda" non-material, seperti: hukum, politik, budaya, agama dan lain-lain. Immanuel Kant menamakannya "Formen a priori".

Dengan demikian maka setiap sesuatu mempunyai jatidiri terlepas pandangan atau sikap manusia terhadapnya.

Adapun ciri khas kepolisian terletak pertama-tama dalam tugasnya ialah penegak hukum dan ketertiban, yang tidak dimiliki aparat pemerintahan lainnya. Demikian juga Polri di Negara kita. Bahkan Polri dibandingkan dengan aparat kepolisian di luar negeri mempunyai jatidiri (seperti yang disebut dalam seminar tersebut) ialah: sebagai pejuang.

Penulis ingin menegaskan lagi bahwa Polri adalah pejuang pembela Tanah Air. Ciri ini mempunyai sejarah. Pimpinan Polri pada tahun 1945 berketetapan hati untuk mengikutsertakan aparat Polri secara aktif dalam mempertahankan Negara secara fisik bersama-

sama seluruh rakyat Indonesia. Pengalaman di negeri Belanda pada Perang Dunia II di mana polisinya tidak ikut berperang melawan Nazi-Jerman, ialah setelah Jerman menduduki Belanda maka Polisi Belanda oleh tentara Jerman dipergunakan untuk mengkhianati bangsanya dengan menangkapi para patriot Belanda. Maka pada tanggal 14 November 1946 dibentuk kesatuan Brimob; satu kompi Brimob Kepolisian Karesidenan dan batalyon-batalyon Brimob di Banyumas, Surakarta, Surabaya, khusus dipersiapkan untuk berperang.

Bukti jasa-jasa anggota-anggota Brimob dan kesatuan Polri lain yang gugur dalam melawan pasukan-pasukan Belanda kita lihat pada monumen-monumen:

1. Telogowaru di daerah Malang.
2. Nganjuk (Jawa Timur).
3. Rowulu (Yogya-Barat).
4. Benteng Huraba (Padang Sidempuan, Sumatera Utara).
5. Palupuh (Bukit Tinggi, Sumatera Barat).
6. Kedungpring (Lamongan, Jawa Timur).
7. Tumpeng (Lumajang).

(Dr. Hadiman dan Suparman "Lintasan perjalanan Kepolisian RI sejak Proklamasi").

Perjuangan Polri melawan pasukan-pasukan Belanda disebut juga dalam buku Pierre Heyboer "De Politionele Acties" 1979, yang bersumber pada dokumentasi Belanda. Pada halaman 78 dimuat pertempuran Korps Marinir melawan Batalyon Brimob Polisi di Lawang pada tanggal 23 Juli 1947 di bawah judul "Jalan berdarah menuju Malang" (De bloedige weg naar Malang). Halaman 97 memuat peristiwa di daerah Banyumas sesudah Purwokerto diduduki tentara Belanda pada tanggal 31 Juli 1947 yang dituliskan sebagai berikut:

"Di lembah Serayu berkumpul anggota-anggota Brigade Mobil Polisi dalam jumlah besar di bawah komando Inspektur Bambang Suprpto di sekeliling Kampung Karangnangka. Mahasiswa-mahasiswa, anggota-anggota Hizbullah dan pasukan-pasukan ALRI dari Cilacap menggabungkan diri pada anggota-anggota polisi ini. Dengan kekuatan tempur terkombinasi ini, Suprpto menyerang Purwokerto pada malam tanggal 26-27 Agustus, sampai dapat menerobos ke pusat kota. Di Purwokerto dalam periode ini dilakukan

serangan-serangan malam hari oleh kelompok komando 'Pancasoka' yang dipimpin oleh letnan II kesatuan Laskar Supeno."

Dapat diterangkan bahwa letnan II Supeno sebenarnya adalah Inspektur Polisi II lulusan Sekolah Polisi Mertoyudan, yang kemudian gugur di Beji (Karangnangka) pada tanggal 29 Oktober 1947. Inspektur Polisi I Bambang Suprpto yang oleh Markas Besar Angkatan Darat diberi pangkat tituler letnan kolonel, karena dalam pasukannya di Banjarnegara tergabung sejumlah anggota Angkatan Darat yang kehilangan kontak dengan induknya, gugur pada Perang Kemerdekaan kedua pada tahun 1949 di daerah Tegal Selatan.

Pada halaman 75 buku Pierre Heyboer tersebut termuat peristiwa perjuangan pasukan Polri di sekitar Banyuwangi (Jawa Timur) pada tanggal 21 Juli 1947 yang tidak termuat dalam buku Dr. Hadiman dan Suparmin tersebut, yang berbunyi sebagai berikut:

"KOMPI-kOMPI KNIL untuk pertama kali mengalami perlawanan yang berarti pada sebuah pabrik gula di kota kecil Sukawidi. Dalam pabrik terdapat suatu kesatuan polisi yang datang dari Yogya untuk memperkuat. Kesatuan polisi ini juga ditembaki oleh meriam-meriam kapal. Di pinggir kota, kompi-kOMPI KNIL berurusan dengan pasukan-pasukan ALRI dari kesatuan ke-10 yang markas-besarnya terletak di Banyuwangi. Sesudah kurang dari satu jam maka orang-orang KNIL menerobos sampai ke pelabuhan di mana kompi polisi yang mempertahankannya ditembaki oleh kapal patroli Belanda "Marter". Setelah lebih dari separuh anak buahnya gugur, maka letnan II yang memimpin kompi polisi menyerah."

Demikian beberapa saham dari Polri dalam mempertahankan Nusa dan Bangsa.

Jatidiri Polri sebagai pembela Tanah Air ini disusul oleh perjuangan Polri untuk masuk ABRI dengan alasan-alasan:

1. sesama pemikul senjata melawan penjajah;
2. untuk menghilangkan perbedaan perlakuan dalam pemberian gaji, tunjangan, perlengkapan, dan perlakuan protokoler;
3. untuk menghilangkan rivalitas negatif antara kesatuan-kesatuan Polri dan Angkatan

Perang dan untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian pertikaian/per-tempuran antara kesatuan-kesatuan Polri (Brimob) dan Angkatan Perang.

Ciri Polri sebagai ABRI merupakan akibat logis dari ciri Polri sebagai pejuang pembela Tanah Air. Dan akibat logis dari masuknya Polri ke dalam ABRI maka Polri merupakan pengembalian fungsi hankam dan fungsi sopol.

Ada ciri negatif yang mewarnai anggota Polri di lapangan, ialah ciri yang dinamakan di Amerika Serikat "grass-eater" (pemakan rumput). Ini terdapat juga pada polisi Amerika Serikat di lapangan.

"Makan Rumput" di sini diartikan sebagai menikmati kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas, pemberian-pemberian *tanpa* menyalahgunakan wewenang atau kedudukan (penikmatan dengan menyalahgunakan kedudukan dinamakan "makan daging"). Tiap jabatan kepolisian di lapangan dikelilingi rumput-rumput yang berupa kemudahan itu. Bila seorang pejabat berulang-tahun maka hadiah-hadiah datang dari mana-mana berupa uang, bahan kebutuhan pokok dan sebagainya. Bila pejabat tersebut butuh mobil, dapat mudah meminjamnya, atau membelinya dengan syarat-syarat yang sangat lunak.

Dalam kondisi penggajian yang minim namun tugas yang diiringi kewajiban-kewajiban sosial yang memerlukan pembiayaan, maka "makan rumput" tidak dapat dihindari. Maka "makan rumput" yang sebetulnya dilarang seperti "makan daging" mendapat toleransi besar di kawasan dengan kondisi ini.

Pejabat yang tak mau makan rumput tidak dapat berprestasi karena pikirannya selalu terganggu oleh kekurangan biaya hidup. Sebaliknya si pemakan rumput (bahkan yang rakuspun) dapat berprestasi baik dan dapat mencapai tingkat tinggi.

Sudah tentu toleransi terhadap makan rumput ini ada batas-batasnya, ialah terbatas pada: pemberian ala kadarnya tanpa maksud-maksud sampingan; demikian juga pemberian pelayanan, jasa atau fasilitas.

Namun apapun toleransi terhadap makan rumput, ciri ini bukan merupakan ciri yang dapat dibanggakan, sehingga tidak dapat bah-

kan tidak boleh ditanamkan pada generasi penerus.

Profesionalisme Polri

Profesionalisme Polri dalam Seminar Polri digambarkan dengan unsur-unsur:

1. kemahiran dalam melaksanakan tugas pokok; fungsi dan peranannya
2. pengetahuan dan keterampilan sebagai pendukung
3. wawasan tinggi
4. etos kerja tinggi
5. pemanfaatan ilmu dan teknologi kepolisian
6. teknik dan taktik kepolisian secara benar dan tepat
7. hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar.

Profesionalisme sebetulnya merupakan suatu Blankettbegriff, suatu pengertian kulit, pembalut, selimut yang belum menggambarkan isi di dalamnya, ialah jenis profesinya. Seperti dirumuskan di atas "kemahiran dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranannya" maka tugas pokok, fungsi dan peranan masih perlu ditentukan bagi profesi-profesi stratal (dalam polsek, polres, polwil, polda dan pusat) maupun profesi-profesi sektoral (lalu-lintas, reserse, perairan, pendidikan, dan lain-lain) yang masing-masing berbeda.

Suatu profesi, menurut hasil Panitia dari International Association of Chiefs of Police tentang profesi-profesi pada tahun 1938-1939 di Amerika Serikat mempunyai unsur-unsur mutlak:

1. Kesatuan pengetahuan terorganisasi yang diperluas dengan usaha-usaha orang-orang yang bersangkutan dengan profesi ini.
2. Fasilitas-fasilitas untuk pelatihan-pelatihan dalam pengetahuan-pengetahuan dan prosedur-prosedur.
3. Standar-standar kualifikasi yang harus diketahui oleh anggota untuk masuk dan menduduki jabatan.
4. Organisasi profesional dari sejumlah substansional anggota yang berkualifikasi untuk mempraktekkan profesi dan yang berpengaruh dalam pemeliharaan standar-standar profesional dan disiplin dan yang akan mengembangkan program-program

studi dan riset untuk memperkuat dan memperbaiki prosedur-prosedur yang ada.

5. Kode etik yang merumuskan standar-standar tingkah-laku dalam hubungan antar anggota-anggota profesi dengan masyarakat serta hubungan anggota-anggota satu sama lain, dan yang mendidik adanya keharusan untuk memberikan pelayanan profesional dengan pertimbangan-pertimbangan di luar konsiderasi-konsiderasi ekonomis eksklusif. (Don L. Kooken: "Ethics in Police Service").

Kode etik memang perlu bagi setiap jabatan, karena ini melengkapi norma-norma tingkah laku anggota yang ditentukan oleh peraturan hukum.

Polri mempunyai kode etik berupa pedoman hidup Tribrata dan pedoman kerja Catur Prasatia, dan sejak masuknya ke ABRI, ditambah Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Kode etik yang berlaku untuk profesi Polri sudah barang tentu perlu dijabarkan bagi tiap jenis profesi dalam susunan stratal maupun sektoral. Inggris sudah menentukan kode etik bagi polisinya sejak tahun 1829, dan kode etik ini yang berupa Sembilan Asas Kepolisian Inggris (The Nine Principles of the British Police) memang sangat perlu, mengingat hukum kepolisiannya sebagian besar adalah tidak tertulis (common law) dan polisi Inggris sejak tahun 1829 tidak bersenjata dan harus mengandalkan kekuatan dan efektivitasnya pada bantuan masyarakat.

Di Amerika Serikat dirasakan perlu juga adanya kode etik bagi polisinya, yang tersusun beraneka ragam (tidak adanya polisi nasional, adanya polisi negara bagian, polisi kota dan sheriff di daerah) maka Don L. Kooken dalam bukunya tersebut mengusulkan kode etik bagi kepolisian Amerika Serikat yang terdiri dari sepuluh point.

Drs. Hadisaputro dalam orasi ilmiahnya pada tanggal 17 Juni 1982 di PTIK menyebut kode etik dalam penegakan hukum di Amerika Serikat yang berupa empat janji petugas penegak hukum.

Juga Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Sidang Umumnya pada tanggal 17 Desember 1979 mengeluarkan Resolusi No. A 34/169

tentang Kode Tingkah Laku Pengabdian Hukum yang memuat 8 (delapan) pasal terutama mengenai hubungan pengabdian hukum dan tersangka.

Dalam pasal 7 Resolusi ini ditentukan bahwa pengabdian hukum harus membersihkan diri dari berbagai macam perbuatan korup.

Hal-hal dianggap perbuatan korup dalam Konferensi Anti Korupsi di Amsterdam (Nederland) pada bulan Maret 1992 adalah:

I. Di bidang kebijaksanaan:

1. nepotisme
2. patronase
3. pelanggaran kewajiban legislatif
4. pelanggaran kewajiban birokrasi
5. pengambilan keputusan menyimpang dan penyalahgunaan wewenang lainnya.

II. Di bidang keuangan:

1. suap
2. kick-back (komisi, uang jasa, dsb)
3. klaim palsu
4. fraude (penggelapan)
5. racketeering (usaha yang dilarang)
6. money laundering
7. kejahatan komputer
8. menyalahgunakan kartu kredit

Maka profesionalisme merupakan realisasi pelaksanaan tugas profesi secara sempurna dan efektif dengan menjauhkan segala macam pantangan termasuk "makan rumput" di luar terpaksa untuk hidup sekeluarga.

Modernisasi Polri

Modernisasi adalah usaha untuk mencapai keadaan atau tingkat modern.

Modern menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: 1. terbaru, mutakhir; 2. sikap dan berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman, dan menurut Dictionary Funk & Wagnalls: "Pertaining to the present or recent period; not ancient". Modern berasal dari kata-kata Latin: modernus yang bersuku-kata "modo", artinya: kini, sekarang. Hasil Seminar Polri menyebut "modernisasi menurut ABRI" sebagai "proses adaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkup global untuk mencapai tujuan pembangunan ABRI profesional, efektif, efisien dan modern."

Everett E. Hagen, seorang guru besar ekonomi pada Institut Teknologi Massachusetts (Amerika Serikat) dalam bukunya "On the Theory of Social Change" (dengan subjudul "How Economic Growth begins") pada tahun enam puluhan, berkesimpulan antara lain bahwa negara-negara dengan pendapatan rendah tidak dapat begitu saja meniru teknik-teknik yang dipergunakan di Barat (yang dimaksud: negara-negara maju) Kemajuan teknologi di negara-negara ini memerlukan kreativitas yang bermutu tinggi seperti di Barat, dan inovasi-inovasi yang diperlukan tidak saja berupa perubahan-perubahan tekno-ekonomi, namun juga sosial (yang terakhir ini barangkali lebih kompleks).

Apa yang dikemukakan Everett E. Hagen bagi pertumbuhan ekonomi yang mengenai kreativitas dan inovasi, penulis anggap relevan juga bagi kemajuan dan modernisasi Polri. Hagen menganggap bahwa pengertian inovasi sudah mencakup pengertian kreativitas, dan inovasi hanya dapat terjadi dalam atau mengenai bidang khusus (tidak secara umum/ yang bervariasi dari: penemuan model pembuka tutup botol sampai pada teori relativitas).

Inovasi oleh Hagen diartikan sebagai "Tiba pada suatu konsep mental dan estetis baru dan memberikannya realitas di dunia di luar pikiran". Ia membagi inovasi dalam: 1. kreativitas atau perbuatan kreatif dan 2. inovasi teknologis, yang mengkonversi konsepsi baru dalam perbuatan atau dalam bentuk materiil.

Mengenai kualitas kreativitas, Hagen menyebut personalitas inovasional yang berciri watak:

1. Terbuka bagi pengalaman.
2. Cenderung menyadari gejala-gejala (terutama di bidang kehidupan yang mempunyai arti bagi individu, seperti: membentuk sistem interaksi antara komponen-komponen yang jelas);
3. Imajinasi kreatif.
4. Percaya dan puas dengan penilaian-penilaian sendiri.
5. Suka menghadapi dan menangani masalah-masalah dalam menyelesaikan keganjilan pikiran (confusion) dan ketidakselarasan (unconsistency).

6. Mempunyai perasaan tentang adanya kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu.
7. Intelegensi.
8. Energi.
9. Mempunyai persepsi bahwa dunia agak mengancam dan bahwa harus diikhtiarkan secara terus-menerus, bila mampu untuk menanganinya.

Penulis berpendapat bahwa dalam modernisasi Polri pada anggota, dan terutama para pemimpin di segala tingkat perlu memiliki kepribadian inovasional untuk memajukan bidang pekerjaannya masing-masing. Yang penting bagi pemimpin dan secara kontinu harus diperhatikan adalah alam pikiran bawahannya yang perlu mengikuti kemajuan-kemajuan dalam kalangan Polri, sebab kemajuan metoda dan teknologi bila tidak diikuti oleh alam pikiran yang bersangkutan, akan sia-sia belaka.

Pendidikan di SESPIM Polri

Memberi pengertian tentang sesuatu dapat dilakukan dengan berbagai cara, ialah dengan mempergunakan:

1. Teknik-teknik informasi, propaganda, indoktrinasi dan habituasi, yang lazim digunakan dalam suatu lembaga pendidikan adalah teknik informasi dengan sarana audial (ceramah, pidato, diskusi), visual (gambaran, film, pameran) dan atau audio-visual (film bicara, televisi, sandiwara).
2. Teknik propaganda dengan aspek-aspek:
 - a. Kristalisasi (untuk membuat sikap ragu-ragu menjadi tegas).
 - b. Konservasi (untuk memberi dukungan kepada pikiran-pikiran atau ide-ide yang sudah ada).
 - c. Konversi (untuk merubah pikiran pemirsa/pendengar sehingga sesuai dengan pikiran propagandis).
3. Teknik indoktrinasi (dengan komunikasi timbal-balik, seperti: penataran).
4. Teknik habituasi (menciptakan kebiasaan-kebiasaan dengan pelatihan, peragaan, dan sebagainya).

Cara yang paling efektif dalam waktu yang terbatas adalah indoktrinasi dalam bentuk penataran seperti Penataran P4, dengan ceramah, pendalaman dan diskusi. Cara ini dapat dilakukan di Sespimpol bagi pemahaman jatidiri, profesionalisme dan modernisasi Polri, sehingga alumni tidak hanya memahaminya namun juga menghayatinya untuk mengamalkannya kemudian.

Penataran ini sekaligus bertujuan agar alumni selaku pimpinan atau anggota staf akan meneruskan penanaman paham tentang ketiga topik tersebut kepada bawahannya.

Untuk mempertajam penglihatan terhadap jatidiri, profesionalisme dan modernisasi Polri ada baiknya kalau di Sespimpol (bila belum) diberi ceramah atau mata kuliah tentang kepolisian di luar negeri sebagai perbandingan, khusus perumusan tugas-tugasnya, organisasinya, administrasinya dan hubungan aparaturnya baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat. Cara formulasi dan formalisasi tugas kepolisian serta struktur organisasi kepolisian di berbagai negara tidak sama.

Di samping penataran ini dirasakan perlu juga untuk secara kontinu mengingatkan kepada anggota Polri akan pentingnya jatidiri, profesionalisme, dan modernisasi Polri, dengan mengabadikan nama-nama mereka yang berperan dan berjasa dalam mengukuhkan dan mengembangkan ketiga topik tersebut, dan yang sudah tiada, seperti:

1. Mengenai jatidiri sebagai pembela Tanah Air:
 - a. Gugur melawan Belanda: Bambang Suprpto, Supeno, Tut Harsono, dan lain-lain.
 - b. Gugur melawan PKI: Kombespol Duryat, Komisarisi Polisi Sunaryo, dan lain-lain.
2. Mengenai profesionalisme Polri: para pendidik dan pengajar seperti: Prof. Djokosutono, Prof. Sunaryo, Prof. Kusumaatmadja, Prof. Tirtawinata, Ki Hajar Dewantoro, R.M. Broto Modokusumo dan eks pemimpin lembaga pendidikan Polri: R. Soebar-kah, dan lain-lain.

3. Mengenai modernisasi Polri: para pemimpin Polri (Kapolri, Wakapolri, Deputi Kapolri, seperti: R.S. Soekanto, R. Soemarto, Soetjipto Joedodihardjo, Drs. Soeparno Soerjatmadja, dan lain-lain).

Pengabdian ini dapat dilakukan dengan pemberian nama-namanya kepada: gedung-gedung, ruangan-ruangan, jalan-jalan dalam kompleks Sespimpol.

Di luar Sespimpol, pengabdian nama-nama tersebut seyogyanya dilakukan di markas-markas Polri (Polsek, Polres, Polwil, Polda.

Mabes) dan di lembaga-lembaga pendidikan Polri.

Juga dapat diusahakan oleh Polri setempat agar nama-nama mereka diabadikan di tempat atau daerah kelahirannya, seperti yang sudah dilakukan di Purwokerto yang kini mempunyai jalan-jalan (penting) dengan nama: Jalan Letjen Pol. R. Soemarto dan Jalan Bambang Suprpto.

Dengan demikian kita di mana-mana dapat diingatkan kepada jatidiri, profesionalisme dan modernisasi Polri.

Penulis: Drs. H. Soebroto Brotodiredjo SH



BERITA BERGAMBAR



UPACARA PEMBUKAAN
PENDIDIKAN REGULER
KE-32 SESPIM POLRI
TP. 1996/1997
TGL. 26 JUNI 1996.

Laporan kesiapan upacara pembukaan disampaikan oleh Ka Sespim Polri, Mayjen Pol. Drs. Sudarmadji (*kiri atas*) ■ Penyerahan tanda Perwira Siswa, Drs. Diby Widodo secara resmi membuka pendidikan reguler Sespim Polri. (*tengah*) ■ Para Perwira Siswa Dikreg 32 (*bawah*).



PERINGATAN HARI ULANG TAHUN BHAYANGKARA KE-50 TGL. 1 JULI 1996

Inspektur Upacara, Waka Sespim Polri
Brigjen Pol. Drs. Adjiawan tengah
menyampaikan amanat Kapolri.



Pemeriksaan pasukan.



Penyematan tanda kehormatan.





Beberapa kegiatan yang terekam dalam peringatan HUT Bhayangkara Emas, antara lain Penyerahan piala untuk kegiatan olah raga (atas) ■ Donor darah (tengah) ■ dan Ziarah ke Taman Makam Pahlawan (bawah).

BHAKTI - DHARMA - WASPADA



ORIENTASI LINGKUNGAN PERWIRA SISWA SESPIM POLRI DIKREG 32



Mengenal Lingkungan: Naik gunung, turun gunung di seputar daerah Lembang (*atas*) ■ Pengumpulan data di lingkungan kampus Sespim Polri (*tengah dan bawah*).



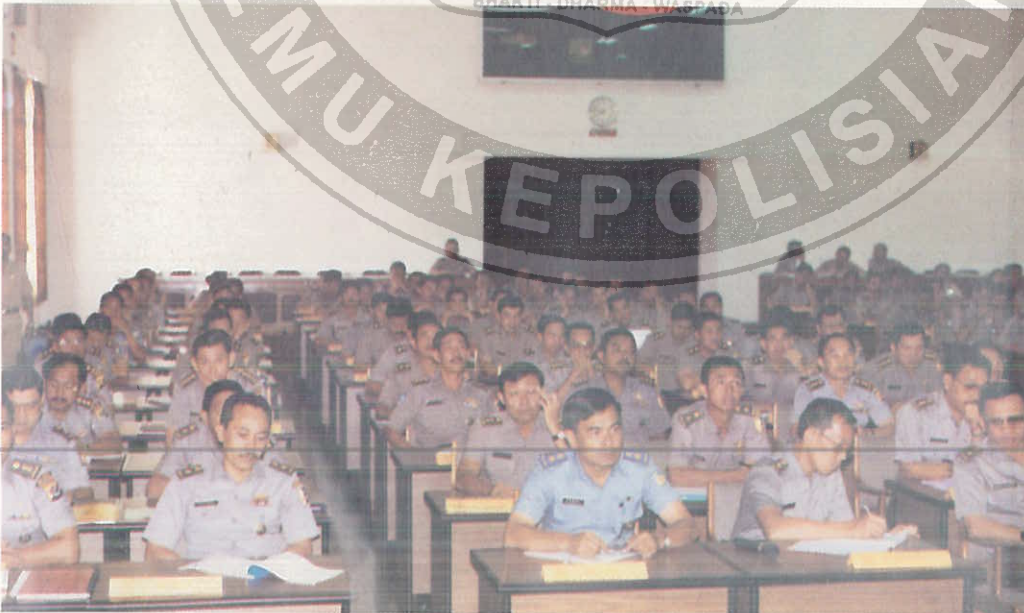
KEGIATAN AWAL PERWIRA SISWA



Kunjungan ke Indonesia Air Show.
Mengamati dari dekat kemajuan teknologi
persenjataan dan kedirgantaraan.



Ceramah Wakil Gubernur Jawa Barat,
Drs. H.M.A. Sampurna di hadapan para
Perwira Siswa.

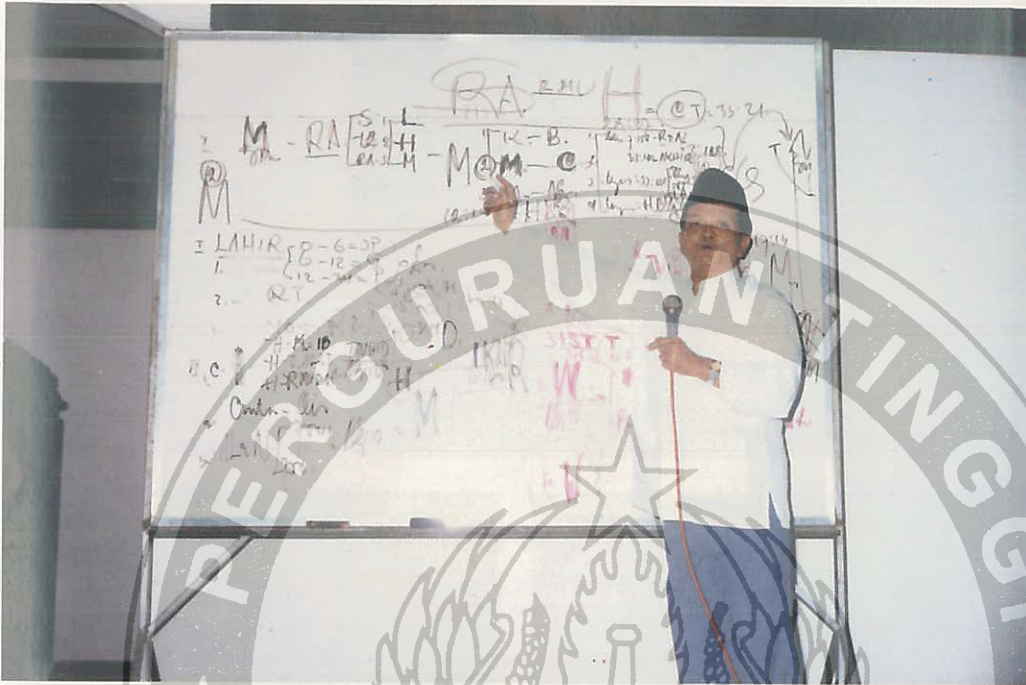


SEPUTAR KAMPUS



Pengukuhan Kol. Pol. Drs. H. Oemar M. Isa sebagai Gadik Sespim Polri (*kiri atas*) ■ Rapat Validasi kurikulum Sespim Polri (*kanan atas*). ■ Reuni Paguyuban Haji Arbain, diselenggarakan di Sespim Polri tampak Ka Sespim Polri, Mayjen Pol. Drs. Sudarmadji tengah berbincang dengan Kapolres Subang (*tengah*) dan indahnya kawasan Gunung Tangkuban Parahu tidak dilewatkan oleh Ny. Sudarmadji beserta rombongan (*bawah*).





Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw, 12 Rabiul Awal 1417 H
dengan penceramah Kyai H. Yunus Nataatmaja



Para hadirin dengan tekun mendengarkan materi yang disampaikan.

UPACARA PELANTIKAN SENAT PERWIRA SISWA SESPIM POLRI DIKREG-32



Ka Sespim Polri, Mayjen Pol. Drs. Sudarmadji menyampaikan amanatnya. (atas) ■ Peserta upacara. (kiri tengah) ■ Melantik pengurus senat. (kanan tengah) ■ Bergambar bersama Ka Korsis Sespim Polri, Kol. Pol. Drs. Muafi Sahudji, S.H. (bawah).

